

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kekayaan budaya dan tradisi lokal yang tidak terhitung banyaknya. Keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama di Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk, tetapi sudah berlangsung lama sejak zaman kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Setiap budaya mengandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai hidup sesuai dengan adat daerah masing-masing. Budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat itulah yang biasa disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Pada era globalisasi sekarang ini, motivasi menggali dan melestarikan kearifan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk menemukan kembali identitas bangsa yang bergeser, jika tidak ingin dikatakan hilang dari kehidupan masyarakat, karena proses persilangan dialektis atau karena akulturasi dan transformasi yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan di era globalisasi seperti sekarang ini.

Pengikisan nilai kearifan lokal terjadi dengan berbagai cara. Yang paling berpengaruh dalam regresi nilai kearifan lokal adalah dengan melalui proses akulturasi budaya. Sektor yang paling rentan dalam masuknya budaya-budaya luar yang mempengaruhi hidupnya nilai kearifan lokal yaitu sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional yaitu sektor pariwisata. Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu Fandeli (1995: 58) memberikan argumen bahwa

pariwisata adalah keseluruhan kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki peranan cukup besar dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan adanya kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata, pemerintah daerah mempunyai tambahan pemasukan kas daerah. Bahkan di beberapa daerah didapati bahwa industri pariwisata mampu mengangkat daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai yang kebutuhan masyarakat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka provinsi, kabupaten atau kota madya berperan sentral dalam perumusan kebijakan daerah, maka sumber-sumber yang ada di daerah perlu di optimalkan.

Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah. Dengan kata lain daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 285 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;

Randy Fadillah Gustaman, 2016

Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran Wilayah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer; dan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemekaran wilayah yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 sampai sekarang terus berlanjut dan semakin tinggi keinginan wilayah-wilayah untuk memekarkan diri. Permintaan dari suatu daerah bukan hanya tingkat kabupaten, akan tetapi desa-desa juga turut menginginkan adanya pemekaran.

Pemekaran dalam prosesnya merupakan sebuah bentuk demokratisasi yang tidak dapat dipungkiri didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan elite politik. Kecenderungan elit politik dalam memperjuangkan pemekaran suatu wilayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah lain yang sudah mendapat mandat untuk pembentukan daerah otonom baru, begitu puladengan pemekaran kabupaten Ciamis. Semangat pemekaran muncul dari wilayah pengandaran, yang sebelumnya terlebih dahulu memekarkan diri dari kabupaten Ciamis adalah wilayah Banjar Patroman.

Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah wilayah yang pendapatan asli daerahnya sebagian besar didapat dari sektor pariwisata, dengan progres perkembangan yang cukup baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang begitu pesat, maka pemerintah daerah kabupaten pangandaran juga harus cepat tanggap dengan dampak perkembangan pariwisata itu sendiri terhadap pola kehidupan, kebiasaan dan budaya masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dengan banyaknya para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran, maka sedikit banyak akan mempengaruhi pola kehidupan, kebiasaan dan budaya masyarakat Pangandaran. Dengan lebih intensnya masyarakat Kabupaten Pangandaran bersosialisasi dan berkomunikasi dengan wisatawan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pangandaran, sudah barang tentu akan menyebabkan akulturasi budaya antara budaya atau nilai kearifan

Randy Fadillah Gustaman, 2016

Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran Wilayah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

budaya lokal asli masyarakat pangandaran dengan budaya luar. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif memang diakui sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran, seperti: dengan adanya para wisatawan yang berbeda latar belakang dan tempat asal, terutama dari kota-kota besar ataupun luar negeri akan sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran dari segi teknologi. Adanya sisi positif akan di iringi dengan sisi negatif dengan terjadinya proses akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya luar yang di bawa oleh para wisatawan. Nilai-nilai negatif tersebut seperti: pergeseran moral (gaya hidup dan cara berpakaian), mengikisnya kecintaan terhadap budaya lokal dari Kabupaten Pangandaran itu sendiri.

Pada dasarnya mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Pangandaran berasal dari suku sunda yang memang suku asli penduduk di daerah Jawa Barat. Masyarakat Pangandaran sangat menjaga dan menanamkan kearifan budaya lokal yang memiliki banyak nilai estetika,etika dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Dengan banyaknya para pendatang yang membawa nilai-nilai budaya luar sangat dikhawatirkan terutama dampak negatif dari pengaruh budaya luar tersebut. Gaya hidup masyarakat Sunda yang berada di Kabupaten Pangandaran sendiri lambat laun mulai berubah, mengikuti *trend* yang sedang berlaku dari pengaruh akulturasi budaya tersebut. Cara berpakaian, berbahasa, berperilaku dan memperlakukan orang lain pun sudah berbeda.

Dari segi berpakaian sebagai warga yang identik dengan budaya ke timuran, orang sunda memiliki norma yang terhormat dalam berpakaian, wanita layaknya berpakaian tertutup, atau mungkin berpakaian sopan, begitu juga dengan pria. Namun yang terjadi saat ini, banyak wanita di tatar Sunda, khususnya di Wilayah Kabupaten Pangandaran yang mulai meniru gaya berpakaian masyarakat kawasan barat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri dan harus bisa dicegah,dan diminimalisir sesegera mungkin, salah satunya dengan sebuah perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan sebuah kebijakan pelestarian kearifan lokal setempat. Dari segi bahasa, Bahasa Sunda merupakan bahasa lokal masyarakat Sunda yang dikembangkan dari asal muasal keturunan masyarakat Sunda itu sendiri. Untuk itu

Bahasa Sunda sangatlah penting untuk dilestarikan. Dari segi perilaku masyarakat Sunda dikenal ramah dan mudah bergaul dengan siapapun. Dengan pergeseran zaman dan akulturasi budaya hal tersebut sudah mulai pudar, untuk itu maka sudah selayaknya pemerintah daerah kabupaten pangandaran membentuk sebuah kebijakan untuk membentengi dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal setempat agar tidak tergerus oleh budaya-budaya luar yang dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata yang berada di wilayah kabupaten pangandaran

Penerbitan sebuah kebijakan pariwisata yang inovatif dan kreatif serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal setempat sangat dibutuhkan, agar nilai-nilai budaya kearifan lokal setempat tidak hilang dan justru menjadi nilai lebih bagi perkembangan pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dari Sektor Pariwisata Pasca Pemekaran Wilayah (Ditinjau dari Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diajukan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhatian dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal setempat dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata dan pembentukan karakter masyarakat.
2. Bagaimana pengaruh akulturasi budaya yang dibawa oleh wisatawan terhadap kearifan lokal yang menjadi dasar pembentukan karakter dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhatian dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal setempat dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata dan pembentukan karakter masyarakat;
2. Untuk mengetahui pengaruh akulturasi budaya yang dibawa oleh wisatawan terhadap kearifan lokal yang menjadi dasar pembentukan karakter dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Pangandaran;
3. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang didalamnya dipelajari mengenai Kebijakan Publik dan kearifan lokal, juga dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

